



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2026



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perencanaan, penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah, yang disusun sebagai wujud komitmen DPMPTSP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPMPTSP Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2021–2026, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota/Provinsi yang berlaku. Selain itu, penyusunan RKT ini juga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta kebijakan nasional dan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha.

Dokumen RKT ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja tahunan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP selama Tahun 2026. Dengan demikian, RKT menjadi acuan utama bagi seluruh unit kerja di lingkungan DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). RKT juga berfungsi sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, serta bahan evaluasi dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Dalam konteks peningkatan iklim investasi dan kualitas pelayanan publik, RKT DPMPTSP Tahun 2026 diharapkan mampu mendorong terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, pasti, dan transparan, serta mendukung peningkatan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, perencanaan kinerja yang tertuang dalam dokumen ini disusun secara partisipatif dan terintegrasi, dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya serta tantangan dan dinamika pembangunan yang dihadapi ke depan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan RKT ini sangat bergantung pada dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Untuk itu, kami mengharapkan sinergi, koordinasi, dan komitmen bersama agar seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara

optimal.

Akhir kata, kami berharap Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman dan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini.

Tenggarong, Desember 2025

Mengetahui
Kepala DPMPTSP



Alfian Noor, SE., M.Ling
196901131995031000

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. DASAR HUKUM	2
1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	5
1.4. STRUKTUR ORGANISASI	5
BAB II.....	8
RENCANA STRATEGIS	8
2.1. VISI	8
2.2. MISI.....	8
2.3. TUJUAN DAN SASARAN	9
2.4. RENCANA KINERJA	10
BAB III.....	23
PENUTUP	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran	10
Tabel 2. IKU DPMPTSP	12
Tabel 3. Program dan Kegiatan Tahun 2026	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi.....	6
------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dituntut untuk semakin berorientasi pada hasil, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap perangkat daerah wajib menyusun perencanaan kinerja yang sistematis, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. Dalam konteks tersebut, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen strategis yang memiliki peran penting sebagai pedoman pelaksanaan kinerja tahunan instansi pemerintah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan iklim investasi, serta kemudahan berusaha. Kompleksitas tantangan pembangunan, dinamika regulasi, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat dan dunia usaha menuntut Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk bekerja secara lebih efektif, efisien, dan profesional.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPMPTSP Tahun 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). RKT disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta sinergi dengan kebijakan dan program pemerintah pusat di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha.

Selain itu, RKT Tahun 2026 juga disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, termasuk capaian indikator kinerja utama, permasalahan yang dihadapi, serta rekomendasi hasil evaluasi internal maupun eksternal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan kinerja yang disusun tidak bersifat administratif semata, tetapi benar-benar menjadi instrumen perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP.

Melalui RKT, sasaran kinerja, indikator kinerja, target tahunan, serta program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dirumuskan secara jelas dan terukur. Dengan demikian, RKT menjadi dasar bagi penyusunan Perjanjian Kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengendalian kinerja, serta pengukuran dan pelaporan kinerja tahunan. RKT juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan keterkaitan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan, sehingga penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara optimal dan bertanggung jawab.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta mendorong peningkatan realisasi investasi, RKT DPMPTSP Tahun 2026 diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan dunia usaha. Perencanaan kinerja yang baik diharapkan dapat menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 menjadi suatu kebutuhan yang strategis dan mendesak. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas dan terarah bagi seluruh jajaran DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1.2 DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008

- tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
 20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
 21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
 23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
 24. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diamatkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk membantu Bupati untuk melaksanakan tugas bidang urusan Penanaman Modal serta dekonsentrasi dan tugas bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

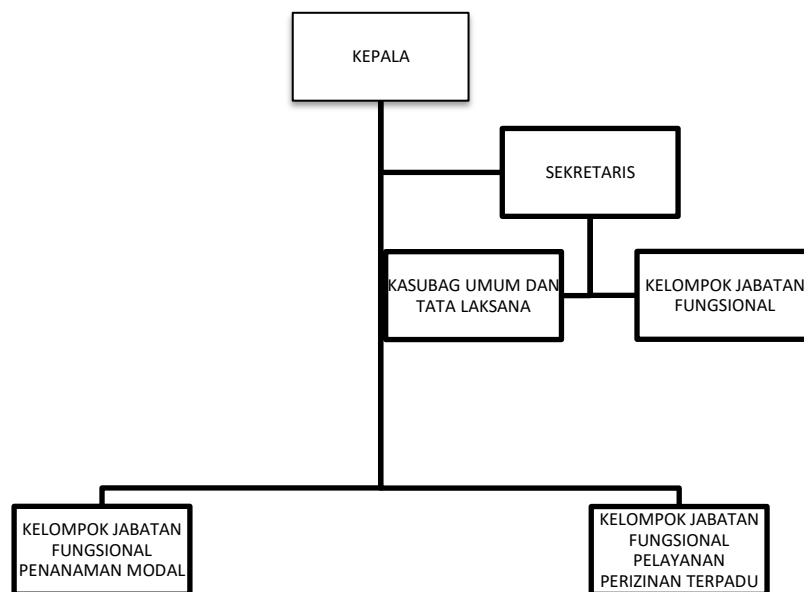
- a. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi :
- b. Penyusunan dan Perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Falisitasi Pembinaan Reformasi Birokrasi Dinas;
- e. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam lingkup dinas;
- f. Penyusunan Proses Bisnis Dinas;
- g. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Pelaksanaan dan penataan pelayanan perizinan berbasis risiko;
- j. Pelaksanaan tata kelola penanaman modal;
- k. Pelaksanaan Fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas tersebut diatas, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kasubag Umum Dan Tata Laksana
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Uraian tugas dalam struktur secara singkat disampaikan sebagai berikut :

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintah wajib di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyajikan data dan informasi, serta mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta penyusunan program dan keuangan.

Dibawah sekretaris terdapat 2 bagian:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan, yang mempunyai tugas mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi urusan umum dan ketatalaksanaan.
2. Kelompok jabatan Fungsional.
 - a. Kepegawaian yang dijabat oleh Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
 - b. Penyusunan Program dan Keuangan yang dijabat oleh Perencana Ahli Muda

Jabatan Fungsional Penanaman Modal

Mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan Promosi, Pengembangan Iklim, dan Pengendalian Penanaman Modal dalam Upaya meningkatkan realisasi Penanaman Modal. Adapun Jabatan Fungsional tersebut yaitu:

1. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya;
2. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda;
3. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama.

Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pelayanan elektronik, fasilitasi pelayanan, konsultasi, data dan sistem informasi, serta pengeduan dalam upaya meningkatkan indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan terpadu satu pintu. Adapun Jabatan Fungsional tersebut yaitu :

1. Penata Kelola Perizinan Ahli Madya;
2. Penata Kelola Perizinan Ahli Muda;
3. Penata Kelola Perizinan Ahli Pertama.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui visi “Kukar Idaman Terbaik” menargetkan transformasi daerah berbasis tiga pilar utama: pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran strategis dalam memastikan tercapainya misi pembangunan melalui fungsi investasi dan pelayanan publik yang terintegrasi.

Adapun peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mewujudkan misi kepala daerah terpilih tahun 2025-2029 yaitu pada Misi kedua Kukar Idaman Terbaik, yaitu hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, selaras langsung dengan tugas DPMPTSP. Percepatan investasi pada sektor-sektor ini memerlukan penyediaan data potensi investasi, fasilitasi investor, dan penyederhanaan perizinan usaha. DPMPTSP dapat mendorong pelaksanaan *Program Kawasan Ekonomi Sejahtera* melalui penetapan kawasan prioritas investasi, dukungan kemudahan berusaha (*Easy of Doing Business*), dan penyusunan promosi investasi tematik (seperti: Investasi Hijau di wilayah Ulu, Pariwisata Agro Kutai Tengah, Hilirisasi sektor non ekstraktif (*Refinery*) di wilayah pantai dll).

Dan juga pada Misi ketiga yakni tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme ASN, DPMPTSP juga harus memastikan standar pelayanan publik terus meningkat melalui digitalisasi, integrasi sistem informasi, serta pengembangan Mal Pelayanan Publik. Program “Pelayanan Publik Cerdas” membuka peluang bagi DPMPTSP menjadi penggerak *smart governance* di tingkat daerah. Transformasi tata kelola layanan akan memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperluas basis investasi.

Sejalan dengan misi ketiga tersebut DPMPTSP mendorong untuk mempercepat transformasi digital layanan publik melalui *Mal Pelayanan Publik Cerdas*, penggunaan OSS-RBA, dan penguatan sistem digital serta integrasi sistem perizinan dengan data kependudukan. Ini akan menciptakan pelayanan

publik yang adaptif, cepat, dan transparan.

Melalui sinergi lintas program, DPMPTSP berperan penting dalam menggerakkan investasi produktif yang mendukung transformasi ekonomi daerah. Sebagai lembaga *frontline* dalam interaksi dengan pelaku usaha dan investor, DPMPTSP harus menyesuaikan strategi kebijakannya dengan arah pembangunan berkelanjutan, pro-rakyat, dan berbasis kearifan lokal yang menjadi dasar semangat Kukar Idaman Terbaik.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Tujuan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 diarahkan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Tujuan ini selaras dengan sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya investasi daerah, yang dipandang sebagai salah satu pengungkit utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing daerah.

Indikator utama dalam mengukur pencapaian tujuan tersebut adalah Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN/PMA (persentase). Kondisi dasar (baseline) pada tahun 2025 triwulan III menunjukkan angka -29,18 persen, yang merefleksikan terjadinya kontraksi realisasi investasi akibat perlambatan ekonomi dan dinamika eksternal yang memengaruhi iklim usaha. Kondisi ini menjadi tantangan awal yang harus direspons melalui kebijakan yang adaptif, terarah, dan berbasis pada penguatan pelayanan penanaman modal serta perbaikan ekosistem investasi daerah.

SASARAN

Sasaran Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk mendukung terwujudnya sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya investasi daerah, sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi wilayah. Sasaran ini dijabarkan secara operasional melalui upaya meningkatkan penanaman modal

di Kutai Kartanegara, dengan indikator kinerja utama berupa Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN/PMA.

Pencapaian tujuan tersebut akan didukung melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, penguatan promosi investasi, penyediaan data dan informasi potensi investasi yang akurat, serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang efektif. Dengan demikian, Renstra DPMPTSP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong peningkatan investasi daerah secara berkelanjutan dan berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata. Berpijak dari Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah, berikut disajikan tujuan Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatkan Penanaman Modal di Kutai Kartanegara		Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (%)	-29,18	0	0,8	1	1,10	1,15	1,20	

2.3. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai kartanegara. Di dalam rencana kinerja Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang sasaran strategi, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai Tahun 2026.

Rencana kinerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber Dana yang terbatas. Dengan Rencana kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan akan fokus dan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Rencana Kinerja Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.
IKU (Indikator Kinerja Utama) DPMPTSP
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
1.	Pertumbuhan Realisasi Investasi Sektor Ekonomi non Ekstraktif	%	-54,17	0	1,35	2,70	4,05	5,40	6,70	
2.	Indeks Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu	Nilai	3,9	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4	

Sumber : IKU DPMPTSP 2025-2030

Untuk mencapai target tujuan, sasaran tersebut dilakukan melalui program , kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.
Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan					Meningkatkan penanaman modal di Kutai Kartanegara	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	0,8 Persen	26.944.941.938,81	APBD
Sasaran					Meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah	Pertumbuhan realisasi investasi sektor non ekstratktif		1,35 Persen		APBD
Sasaran					Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha	Indeks Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu		4 Nilai		APBD
2	18	1			<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</i>	Kab. Kutai Kartanegara	79,33 persen	20.370.197.981,81	APBD
2	18	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	50.000.000,00	APBD
2	18	1	02:01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	50.000.000,00	APBD
2	18	1	02:01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	1	02:01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	18	1	02:01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	1	02:01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	umlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	1	02:01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	umlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	1	02:01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	1	02:01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	1	02:02		Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	11.973.667.017,81	APBD
2	18	1	02:02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan	Kab. Kutai Kartanegara	100 Orang/bulan	11.837.747.017,81	APBD
2	18	1	02:02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	1	02:02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	18	1	02:02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	5.000.000,00	APBD
2	18	1	02:02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	1	02:02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	130.920.000,00	APBD
2	18	1	02:02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	1	02:03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dearah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	63.200.000,00	APBD
2	18	1	02:03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	1	02:03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	1	02:03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	13.200.000,00	APBD
2	18	1	02:03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	50.000.000,00	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	18	1	02:03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	1	02:04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	1	02:04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	1	02:04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	1	02:04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	1	02:05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	1	02:05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	1	02:05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	1	02:05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	1	02:05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara			APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	18	1	02:05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	765.000.000,00	APBD
2	18	1	02:06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	1	02:06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 paket	90.000.000,00	APBD
2	18	1	02:06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2 Paket	300.000.000,00	APBD
2	18	1	02:06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2 paket	250.000.000,00	APBD
2	18	1	02:06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bagan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	1	02:06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	1	02:06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	125.000.000,00	APBD
2	18	1	02:06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	1	02:06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah kegiatan/berita	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	1	02:07	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	18	1	02:07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	1	02:07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	1	02:07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	1	02:07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	1	02:07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	1.600.139.752,00	APBD
2	18	1	02:08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	1	02:09	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	266.766.216,00	APBD
2	18	1	02:09	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	APBD
2	18	1	02:09	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	1.333.373.536,00	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	18	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	5.918.191.212,00	APBD
2	18	1	02:09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Kab. Kutai Kartanegara	23 Unit	382.950.000,00	APBD
2	18	1	02:09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	1	02:09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	149 Unit	145.000.000,00	APBD
2	18	1	02:09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	1	02:09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	1	02:09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Kab. Kutai Kartanegara	7 Unit	5.390.241.212,00	APBD
2	18	1	02:09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	1	02:13		Penataan Organisasi	Persentase Jumlah Laporan hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan tatalaksana	Kab. Kutai Kartanegara			APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	18	1	02:13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	2			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi total terhadap target investasi	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	2	02:01		Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Draf regulasi (Perbup/Perda) yang mendukung sektor non-ekstraktif)	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	2	02:02	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	2	02:02	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	2	02:02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen potensi investasi yang dihasilkan (Dokumen IPRO)	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	2	02:02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	02	2,02	0004	Pemutakhiran Data Potensi Invetasi pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran Data Potensi Invstasi	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	2	02:02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara			APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	18	3			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	3	02:01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen latter of intent (LOI)	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	3	02:01	0003	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan PromosiPenanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	3	02:01	0002	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara			APBD
2	18	4			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	4	02:01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan perizinan berusaha yang diterbitkan sesuai SP dan SOP	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	4	02:01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	4	02:01	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	18	4	02:01	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	4	02:01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	5			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	5	02:01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dearah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang disusun	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	5	02:01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	5	02:01	0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implemtasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	18	5	02:01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD
2	18	6			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Kab. Kutai Kartanegara	100 persen	6.574.743.957,00	APBD
2	18	6	02:01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi daerah	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	6.574.743.957,00	APBD
2	18	6	02:01	0002	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	Kab. Kutai Kartanegara	10 Dokumen	6.574.743.957,00	APBD

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 ini merupakan komitmen Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran dari sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2026.

Tenggarong, Desember 2025

Mengetahui
Kepala DPMPTSP



Alfian Noor, SE., M.Ling
196901131995031000

**KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI
DASAR JALAN : WOLTER MONGONSIDI
TENGGARONG
KODE POS 75511**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**